



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 737 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2020;

**Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021 tanggal 25 Januari 2021;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.65-7/93 tanggal 4 Januari 2021;

3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B/2742/VIII/RO/KP.00.00/2019/BNN tanggal - 7 Agustus 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.

**KESATU** : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Badan Narkotika Nasional sejumlah **148** (seratus empat puluh delapan) yang terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 12 (dua belas) dan tenaga teknis sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 APRIL 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
  
R. H. JO KUMOLO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;

Lampiran  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Nomor : 737 Tahun 2021  
Tanggal : 22 April 2021

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**TENAGA KESEHATAN**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	2	0		DEPUTI REHABILITASI . BALAI BESAR REHABILITASI BNN
2.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	1	0		DEPUTI REHABILITASI . BALAI REHABILITASI TANAH MERAH
3.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	1	0		BNNP SULAWESI BARAT
4.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	1	0		BNNP SULAWESI BARAT . BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
5.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	1	0		BNNP PAPUA BARAT
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	1	0		DEPUTI REHABILITASI . LOKA REHABILITASI DELI SERDANG
7.	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	PSIKOLOG KLINIS / PSIKOLOG	1	0		BNNP JAMBI . BNN KABUPATEN BATANGHARI
8.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	0		DEPUTI REHABILITASI . BALAI REHABILITASI TANAH MERAH
9.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0		BNNP PAPUA BARAT
10.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KIMIA	1	0		DEPUTI REHABILITASI . LOKA REHABILITASI LAMPUNG
11.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KIMIA	1	0		DEPUTI REHABILITASI . LOKA REHABILITASI DELI SERDANG
TOTAL			12	0		

**TENAGA TEKNIS**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 STATISTIK	3	0	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	2	0	SEKRETARIAT UTAMA . BIRO KEUANGAN
3.	AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	0	SEKRETARIAT UTAMA . BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
4.	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 HUKUM	4	0	INSPEKTUR UTAMA , INSPEKTUR III
5.	AHLI PERTAMA - KONSELOR ADIKSI	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL	1	0	BNNP PAPUA BARAT
6.	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 BAHASA MANDARIN / S-1 BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGGOK	1	0	DEPUTI HUKUM DAN KERJASAMA , DIREKTUR KERJASAMA
7.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	0	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM
8.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KABUPATEN TRENGGALEK
9.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA SELATAN , BNN KOTA LUBUK LINGGAU
10.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP ACEH , BNN KOTA LHOKEUMAWE
11.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN RIAU , BNN KOTA BATAM
12.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT
13.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA , BNNK SIMALUNGUN
14.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KOTA CIREBON
15.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA BARAT , BNN KABUPATEN SOLOK
16.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KABUPATEN KARAWANG
17.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KABUPATEN GARUT
18.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA , BNNK ASAHAN
19.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KABUPATEN LUMAJANG
20.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KABUPATEN SUKABUMI
21.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA BARAT , BNN KOTA PAYAKUMBUH

**TENAGA TEKNIS**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
22.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN
23.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP ACEH , BNN KOTA BANDA ACEH
24.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KABUPATEN KEDIRI
25.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KOTA MALANG , KASI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
26.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , BNN KOTA PANGKALPINANG
27.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN BARAT , BNN KABUPATEN SINTANG
28.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN BARAT , BNN KABUPATEN KUBU RAYA
29.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN SELATAN , BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
30.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN SELATAN , BNN KABUPATEN TABALONG
31.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA , BNN LABUHANBATU UTARA
32.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI UTARA , BNN KOTA BITUNG
33.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN TIMUR , BNN KOTA SAMARINDA
34.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP ACEH , BNN KOTA LANGSA
35.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN SELATAN , BNN KABUPATEN BALANGAN
36.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN TIMUR , BNN KOTA BONTANG
37.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TENGAH , BNN KABUPATEN BATANG
38.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KABUPATEN BLITAR
39.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN BARAT
40.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN SELATAN , BNN KABUPATEN TANAH LAUT
41.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA , BNN BATU BARA
42.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN TENGAH , BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
43.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA SELATAN , BNN KOTA PAGAR ALAM
44.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP ACEH , BNN KABUPATEN PIDIE

**TENAGA TEKNIS**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
45.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI TENGGARA
46.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN UTARA , BNN KOTA TARAKAN
47.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KOTA MOJOKERTO
48.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TENGAH , BNN KOTA TEGAL
49.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP GORONTALO , BNN KABUPATEN GORONTALO
50.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN RIAU
51.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA , BNN KOTA TANJUNG BALAI
52.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , BNN KABUPATEN BANGKA
53.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA , BNNK TAPANULI SELATAN
54.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , BNN KABUPATEN BELITUNG
55.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA BARAT , BNNK PASAMAN BARAT
56.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA BARAT , BNN KOTA SAWAHLUNTO
57.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI UTARA , BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
58.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP RIAU , BNN KABUPATEN PELALAWAN
59.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN RIAU , BNN KOTA TANJUNG PINANG
60.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KOTA CIMAH
61.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KABUPATEN CIANJUR
62.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP BALI , BNN KOTA DENPASAR , KASI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
63.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP ACEH , BNNK GAYO LUES
64.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI BARAT , BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
65.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI SELATAN , BNN KOTA PALOPO
66.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI SELATAN , BNN KABUPATEN TANA TORAJA
67.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KEPULAUAN RIAU , BNN KABUPATEN KARIMUN

**TENAGA TEKNIS**

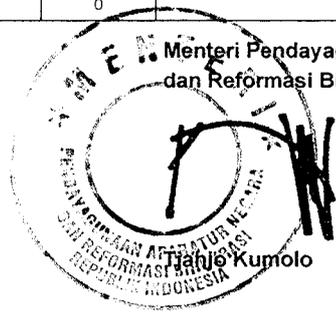
NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
68.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI BARAT
69.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP ACEH . BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG
70.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT . BNN KOTA BANDUNG
71.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN BARAT . BNN KABUPATEN SANGGAU . KASI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
72.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SULAWESI UTARA
73.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA . BNNK DELISERDANG
74.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT . BNN KABUPATEN KUNINGAN
75.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA . BNNK MANDAILING NATAL
76.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA . BNNK SERDANG BEDAGAI
77.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP RIAU . BNNK KUANTAN SINGINGI
78.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP RIAU . BNN KOTA DUMAI
79.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAMBI . BNN KOTA JAMBI
80.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA . BNN KOTA GUNUNGSITOLI
81.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP SUMATERA UTARA . BNN KOTA TEBING TINGGI
82.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP GORONTALO . BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA
83.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP BALI
84.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR . BNN KABUPATEN NGANJUK . KASI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
85.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP BANTEN . BNN KOTA TANGERANG
86.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP KALIMANTAN UTARA . BNN KABUPATEN NUNUKAN
87.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR . BNN KABUPATEN TUBAN
88.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR . BNN KABUPATEN PASURUAN
89.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT . BNN KABUPATEN SUMEDANG
90.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT . BNN KABUPATEN CIAMIS

**TENAGA TEKNIS**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
91.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA BARAT , BNN KOTA TASIKMALAYA
92.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP BANTEN , BNN KOTA TANGERANG SELATAN
93.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM	1	0	BNNP JAWA TIMUR , BNN KABUPATEN SUMENEP
94.	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 HUKUM	4	0	DEPUTI HUKUM DAN KERJASAMA , DIREKTUR HUKUM
95.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	BNNP PAPUA BARAT , KABAG UMUM
96.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	6	0	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN
97.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	BNNP SULAWESI UTARA
98.	TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN APBN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	0	BNNP SULAWESI UTARA
99.	TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN APBN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	0	BNNP PAPUA BARAT
100.	TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN APBN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	6	0	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO KEUANGAN
101.	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	0	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI , KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA , KASUBBAG ORGANISASI
102.	ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	DEPUTI HUKUM DAN KERJASAMA , DIREKTUR KERJASAMA , KASUBDIT KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL , KASI KERJASAMA INTERNASIONAL
103.	ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	DEPUTI HUKUM DAN KERJASAMA , DIREKTUR KERJASAMA , KASUBDIT KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL , KASI KERJASAMA REGIONAL
104.	ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	DEPUTI HUKUM DAN KERJASAMA , DIREKTUR KERJASAMA , KASUBDIT KERJASAMA NASIONAL , KASI KERJASAMA INSTANSI PEMERINTAH
105.	PENGELOLA LABORATORIUM	D-III ANALIS FARMASI / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KIMIA	1	0	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA , KABID PENGUJIAN DAN PEMBINAAN LAYANAN LABORATORIUM , KASUBBID PEMBINAAN LAYANAN LABORATORIUM

**TENAGA TEKNIS**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
106.	PENGELOLA LABORATORIUM	D-III ANALIS FARMASI / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KIMIA	1	0	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA , KABID MUTU DAN RISET LABORATORIUM , KASUBBID RISET LABORATORIUM
107.	PENGELOLA LABORATORIUM	D-III ANALIS FARMASI / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KIMIA	2	0	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA , KABID PENGUJIAN DAN PEMBINAAN LAYANAN LABORATORIUM , KASUBBID PENGUJIAN LABORATORIUM
108.	PENGELOLA LABORATORIUM	D-III ANALIS FARMASI / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KIMIA	1	0	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA , KABID MUTU DAN RISET LABORATORIUM , KASUBBID MUTU LABORATORIUM
109.	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 HUKUM	1	0	DEPUTI HUKUM DAN KERJASAMA , DIREKTUR HUKUM , KASUBDIT BANTUAN HUKUM , KASI KONSULTASI HUKUM
110.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI	1	0	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR , KABAG UMUM , KASUBBAG ADMINISTRASI
111.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI	1	0	BNNP KALIMANTAN TIMUR , KABAG UMUM , KASUBBAG ADMINISTRASI
112.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI	1	0	BNNP KALIMANTAN UTARA , KABAG UMUM , KASUBBAG ADMINISTRASI
113.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI	1	0	BNNP JAWA BARAT , KABAG UMUM , KASUBBAG ADMINISTRASI
TOTAL			136	0	


  
**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
 dan Reformasi Birokrasi**  
**Tanjung Kumolo**